PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama	: Dhimas Bayu Aji Pamungkas
Nomor Mahasiswa	: 15311254
Jurusan	: Manajemen
Peminatan	: Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana strata-1 di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Ditulis oleh :

Nama : Dhimas Bayu Aji Pamungkas

Nomor Mahasiswa : 15311254

Jurusan : Manajemen

Peminatan : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yangg secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 12 Desember 2018

Penulis,

Dhimas Bayu Aji Pamungkas

iii

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Nama	: Dhimas Bayu Aji Pamungkas
Nomor Mahasiswa	: 15311254
Jurusan	: Manajemen
Peminatan	: Keuangan

Yogyakarta, 12 Desember 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

(Zaenal Arifin, Dr., M.Si.)

iv

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Disusun Oleh : **DHIMAS BAYU AJI PAMUNGKAS**

Nomor Mahasiswa : **15311254**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 17 Januari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Zaenal Arifin, Dr., M.Si. .....

Penguji : Nur Fauziah, Dra., MM. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

Man Jadda Wa Jadda, **barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan.**

"I've seen better days. But I also seen worse.
I don't have everything that I want, But I do have all I need.
I woke up with some aches and pains. But I woke up.
My life may not be perfect. But I am blessed"

"Sabar, satu persatu"
-nkcthi-

ABSTRAKSI

Penelitian ini menguji tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran dewan pengawas syariah yang diproksikan dengan NPF dan ROA. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik. Populasi yang diambil adalah seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdaftar dalam statistik perbankan syariah Indonesia 2018, sedangkan sampelnya diambil dengan menggunakan kriteria yang memiliki laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap sehingga mendapatkan sampel sebanyak 13 perusahaan. Program yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keungan bank syariah di Indonesia yang diukur dengan NPF dan ROA.

Kata Kunci: kinerja keuangan, Bank Syariah, NPF, ROA

ABSTRACT

This study examines the effect of corporate governance on financial performance in Islamic banks in Indonesia. In this study using several variables, namely managerial ownership, institutional ownership, independent board size and the size of the sharia supervisory board that are proxied by NPF and ROA. The analytical method used in this study is multiple regression analysis with classical assumption. The population taken is all Islamic banking companies registered in the 2018 Indonesian sharia banking statistics, while the samples are taken using criteria that have complete financial reports and annual reports so that they get a sample of 13 companies. The program used to process data in this study is SPSS. The results of this study indicate that there are no variables that affect to financial performance of Islamic banks in Indonesia as measured by NPF and ROA.

Keyword: *financial performance, Islamic Bank, NPF, ROA*

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bismillahirohmanirohim

Segala puji serta syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah serta barokah-Nya kepada seluruh hamba-hamba-Nya. Sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia".**

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan serta rintangan yang dialami. Namun hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi penulis, dikarenakan adanya doa serta semangat yang selalu mengalir, bimbingan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah mendukung dengan ikhlas dan sepenuh hati dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Jaka Sriyana, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Anjar Priyono, Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonnomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Drs, Zaenal Arifin, M.Si selaku Ketua Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta ilmu-ilmunya yang tiada henti.
4. Mama dan Papa, orangtuaku yang tiada henti-hentinya berdoa dan memberikan dukungan kepada putranya untuk kesuksesan menyelesaikan studi dan karir di masa depan.
5. Mbak Ajeng dan Mas Dika yang selalu memberikan dukungan tiada henti, doa yang terus mengalir untuk adeknya dan memberikan masukan-masukan terkait studi dan kehidupan.
6. Nur Mufidah dan Claudia Villahi, kakak-kakakku yang telah menguatkan dan selalu sedia mendengarkan ceritaku. Terimakasih sudah membantuku untuk bangkit kembali dari semua keterpurukan.
7. Archieta, Ratih Puji, dan kakak-kakak asisten lab ERP lainnya yang senantiasa membantu dikala hambatan skripsi melanda dan juga inspirasi yang telah diberikan.
8. Waktukita.com Team, Mas Ilham, Mas Didik dan Mas Latief yang telah membantuku untuk mengembangkan karir dan terima kasih atas semua pengalaman yang telah dibagi. Semoga kita bisa menjadi orang besar dan berpengaruh suatu hari nanti.
9. Teman-teman Assistant Lab SAP-ERP Team 2018 (Ridho, Untung, Sheila, Nandya, Dekom, Afanina, Ariyanto, Afif, Dita, Fikri, Fajrin, Tegar) terima kasih telah mengisi hari-hariku di semester akhir dengan

pemikiran-pemikiran dahsyat kalian. Semoga teman-teman juga dilancarkan dalam mengerjakan skripsi dan karir masa depan.

10. EMAKNYUS SQUAD, sahabat-sahabatku dibangku kuliah yang selalu memberikan dukungan dari semester awal hingga semester akhir ini, menjadi teman bermain dan menggila selama ini, mengajariku semua pengalaman kehidupan di kota rantau, kalian menjadi pelengkap paling indah masa-masa perkuliahanku dan semoga seterusnya akan tetap menjadi sahabat.
11. Tirta dan Chandra, sahabatku dari SMA yang selalu sedia menerima setiap kekuranganku. Semoga kelak kita terus bersahabat dan menjadi orang sukses.
12. Untuk seseorang di kota Yogyakarta ini, terimakasih untuk semuanya.

    I mean it… ☺
13. Teman-teman sepembimbing (Ghina, Shafira, Sheila, Anne, Untung, Dhea, Kumala), yang senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam pengerjaan skripsi dan menjadi tempat cerita dan berkeluh kesah pengerjaan skripsi.
14. Teman-teman KKN Unit 125, yang menjadi teman selama satu bulan tinggal di Dusun Banyunganti dan melaksanakan kegiatan KKN.
15. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis.

Semoga atas kebaikan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat, Allah SWT memberikan balasan dengan limpahan rahmat-Nya. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Wassalamua'laikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 12 Desember 2018

Dhimas Bayu Aji Pamungkas

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Sampul Depan Skripsi ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....**Error! Bookmark not defined.**

Halaman Pengesahan Skripsi iii

Halaman Pengesahan Ujian..... iv

Motto vi

Abstraksi vii

Kata Pengantar viii

Daftar Isi..... xii

Daftar Tabel xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian..... 6

1.4 Manfaat Penelitian..... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 8

2.1 Bank Syariah 8

2.1.1 Tujuan adanya Bank Syariah 9

2.1.2 Karakteristik Bank Syariah 9

2.1.3 Produk Bank Syariah 10

2.2 Corporate Governance di Bank Syariah 12

2.2.1 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance* 13

2.2.2 Prinsip Corporate Governance 14

2.3 Mekanisme *Corporate Governance* di Bank Syariah 14

2.3.1 Kepemilikan Manajerial 15

2.3.2 Kepemilikan Institusional 16

2.3.3 Pengawas Dewan Komisaris Independen 16

2.3.4 Pengawas Dewan Pengawas Syariah 17

2.4 Kinerja Bank Syariah 17

2.4.1 Risk Profile 18

2.4.2 *Good Corporate Governance* 20

2.4.3 Rentabilitas/Profitabilitas 21

2.4.4 *Capital* 23

2.5 *Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Bank Syariah 23

2.6 Pengembangan Hipotesis 24

BAB III METODE PENELITIAN 32

3.1 Populasi dan Sampel 32

3.2 Data dan Sumber Data 32

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 32

3.4 Alat Analisis 34

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 34

3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda 35

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 36

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 37

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 37

4.2 Hasil Uji Hipotesis 40

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 40

4.2.2 Hasil Uji Pengaruh 42

4.3 Pembahasan 47

4.3.1 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. 47

4.3.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia 48

4.3.3 Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. 48

4.3.4 Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. 49

4.3.5 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 50

4.3.6 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 50

4.3.7 Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 51

4.3.8 Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 53

5.1 Kesimpulan 53

5.2 Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peringkat Non Performing Financing 20
Tabel 2. 2 Peringkat Good Corporate Governance 21
Tabel 2. 3 Peringkat Return On Assets 22

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif 38
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinieritas terhadap NPF 41
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi 42
Tabel 4. 4 Hasil Uji Analisis Linier Berganda variabel dependen NPF 43
Tabel 4. 5 Hasil Uji Analisis Linier Berganda variabel dependen ROA 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian modern. Bank berperan sebagai fasilitator dalam lalu lintas kegiatan permodalan dan pembayaran yang menjadi salah satu kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Selain itu bank juga merupakan lembaga pengelola keuangan yang memiliki fungsi dominan dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pola pengoperasiannya bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Di Indonesia, awal mula berdirinya bank syariah diawali dengan berbagai kegiatan seminar mengenai bunga bank. Selain itu, Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang kala itu diketuai oleh KH. Hasan Basri (alm) juga sangat mendukung untuk mewujudkan pendirian bank syariah di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan diadakannya musyawarah yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk mendukung berdirinya bank syariah. Sehingga dengan berbagai usaha tersebut, maka pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi terbentuk sebagai bank pertama di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan aturan Islam atau disebut bank syariah. Bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam pengoperasiannya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*mudarabah*) dan juga produknya harus halal, jauh dari riba, *gharar* dan *maysir* sesuai dengan tata cara Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, hal tersebut

tidaklah cukup untuk menjamin kesehatan bank syariah sebagai suatu lembaga bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang baik dan profesional pada bank syariah, atau sering disebut dengan sistem *Corporate Governance*.

Menurut Turnbull Report (1999) dalam Effendi (2009) pengertian *Corporate Governance* merupakan suatu sistem untuk mengendalikan internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk pengelolaan risiko di dalam perusahaan untuk memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Negera BUMN pasal 1 ayat 1, No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, GCG diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi dasar suatu proses dan juga mekanisme di dalam perusahaan yang memiliki asas aturan-aturan dalam undang-undang dan etika dalam berusaha. Pada dasarnya, makna dari *Good Corporate Governance* dari berbagai definisi tersebut adalah sama. Secara singkat GCG atau tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk membuat kinerja dan operasional perusahaan lebih terarah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG.

Salah satu aspek yang terkandung di dalam GCG adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam sistem GCG untuk melakukan pengukuran kinerja. Beberapa aspek yang terkait di dalam struktur kepemilikan diantaranya kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit.

Penelitian tentang GCG sudah banyak dilakukan di Indonesia dengan objek dan variabel yang bermacam-macam. Terdapat beberapa aspek yang dapat dipengaruhi oleh praktek GCG dalam perusahaan diantaranya seperti kinerja keuangan, profitabilitas, manajemen laba, persistensi laba, *corporate social responsibility* (CSR) dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013) mengaitkan pengaruh *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan *Leverage* terhadap manajemen laba, hasilnya menunjukan bahwa *leverage ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba yang dihitung dengan rasio *Debt to Assets*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) menguji pengaruh mekanisme GCG, independensi auditor, kualitas audit dan beberapa faktor lainnya terhadap manajemen laba. Mereka menemukan bahwa leverage dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) menguji tentang pengaruh GCG dan struktur kepemilikan terhadap persistensi laba. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifian positif memeiliki pengaruh terhadap persistensi laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Amarullah (2017) menunjukan bahwa praktik GCG memiliki pengaruh positif terhadap arus kas dan memiliki sedikit pengaruh negatif terhadap *leverage* arus kas. Penelitian yang

dilakukan oleh Setyarini dan Paramitha (2011) menemukan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara parsial maupun secara simultan. Penelitian yang dilakukan Pertiwi dan Pratama (2012) menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan *food and beverage* menunjukan bahwa *Corporate Governance* tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati (2012) menemukan bahwa praktek GCG memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dihitung dengan *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Solikhah (2017) menemukan bahwa peringkat *Corporate Governance* perusahaan *go-public* di Indonesia mempengaruhi kinerja keuangan berbasis akuntansi, seperti *Return On Assets* (ROA) dan *Earning per share*. Kedua penelitian ini sama-sama menguji mengenai dampak praktik GCG terhadap kinerja keuangan namun dengan menggunakan metode pengukuran berbeda. Meskipun demikian keduanya sama-sama menunjukan hasil positif, yakni praktek GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari praktek GCG dalam suatu perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Tertius dan Christiawan (2015). Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan objek yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan beberapa

variabel dalam GCG seperti kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan dewan komisaris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini akan mempergunakan beberapa variabel yang berbeda yaitu, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah pada bank syariah di Indonesia. Kemudian objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan yang bekerja di sektor keuangan, sedangkan untuk objek dari penelitian kali ini adalah industri perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, dimana kinerja keuangan dalam penelitian ini akan diukur dari sisi risiko kredit dan profitabilitas.

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh risiko kredit bank syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap risiko kredit bank syariah?
4. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?
7. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah?
8. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.
4. Untuk megetahui pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
7. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

8. Untuk megetahui pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pemilik perusahaan khusunya perbankan syariah bahwa aspek kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran dewan pengawas syariah dari perusahaan penting sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu beberapa aspek tersebut juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1.4.2 Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi investor mengenai kondisi suatu perusahaan perbankan syariah khususnya di bagian kinerja keuangan melalui beberapa aspek tersebut.

1.4.3 Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran dewan pengawas syariah pada bank syariah di Indonesia serta menjadi tambahan referensi dalam melakukan penelitian tentang GCG terhadap kinerja keuangan pada bank syariah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mendorong dilakukannya penelitian lain tentang GCG dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

Bank Syariah pertama kali didirikan oleh Ahmad Najjar di Lembah sungai Nil Mesir pada tahun 1963 yang diberi nama Bank Mith Ghamr. Bank tersebut didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat kalangan bawah dengan teknik operasional yang menerapkan ajaran Islam yang terkandung dalam fiqih muamalah tentang berbagai tata cara transaksi dalam kegiatan perdagangan. Namun bank tersebut tidak lama beroperasi karena diambil alih oleh bank pemerintah. Sedangkan sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia, bermula dengan adanya berbagai kegiatan seminar mengenai bunga bank. Selain itu, didirikannya bank syariah di indonesia juga sangat didudukung oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang kala itu diketuai oleh KH. Hasan Basri (alm). Kemudian hal tersebut semakin diperkuat dengan diadakannya musyawarah yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk mendukung berdirinya bank syariah di Indonesia. Sehingga dengan berbagai usaha tersebut maka pada tahun 1992 terbentuklah Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir bank di Indonesia yang beroperasi secara syariah.

2.1.1 Tujuan adanya Bank Syariah

Para ulama berpendapat bahwa didirikannya bank syariah adalah untuk menghilangkan kezaliman dalam sistem ekonomi khususnya sistem yang ada dalam perbankan. Kezaliman yang dimaksud adalah adanya praktek riba dan unsur eksploitasi atas yang lemah dan yang kuat dalam interaksi ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui, islam sangat melarang adanya sistem riba (bunga) dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, bank syariah hadir untuk melayani masyarakat muslim yang membutuhkan sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran syariat islam tersebut.

2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dari bank konvensional pada umumnya. Pada bank syariah terdapat istilah akad atau sering disebut dengan perjanjian. Akad dilakukan pada setiap tindakan atau kegiatan bisnis yang akan dilakukan dimana kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki konsekuensi *ukhrawi* dan duniawi. Dari segi objek yang dibiayai, bank syariah memiliki prinsip harus halal, yaitu setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh melibatkan riba, *maysir*, dan *gharar*.

Hubungan kemitraan pada bank syariah menempatkan para pihak yang menjalin kerjasama pada posisi yang sebanding atau sejajar sesuai akad. Karena itu, dalam tataran perdagangan yang diawali dengan sebuah kesepakatan maka faktor kemitraan sejajar adalah nilai syari'at. Dari segi struktur organisasi perbankan syariah memiliki badan pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang biasanya diduduki oleh para

ulama. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dikomandoi oleh Dewan Syariah Nasional MUI pusat. Kemudian jika dilihat dari sisi budaya perusahaannya, bank syariah mengadopsi nilai-nilai yang telah terkandung dari Al-Quran dan Al- Hadith serta apa yang telah dicontohkan oleh Nabi.

2.1.3 Produk Bank Syariah

2.1.3.1 Produk Penghimpunan Dana

Tidak jauh berbeda dengan produk dari perbankan konvesional, dalam bidang penghimpunan dana di bank syariah produknya disebut sebagai simpanan, yaitu dana yang diakadkan dalam penyimpanan dalam bentuk deposito, sertifikat deposito, giro, tabungan dan bentuk lainnya yang sejenis. Yang membedakan produk bank syariah dengan bank konvensional adalah ketentuan-ketentuan yang ada. Pada bank syariah giro, deposito dan tabungan yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip *mudarabah* dan *wadi'ah* dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Dalam praktiknya bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Giro dan tabungan pada bank syariah bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan serta tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2.1.3.2 Produk Penyaluran Dana

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi maka disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, bank syariah juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli yang terdiri atas pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan *isthishna'*. Kedua adalah pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, yaitu ijarah dan ijarah *muntahiya bit Tamlik*. Yang ketiga adalah pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Keempat adalah pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam, yaitu pembiayaan *qardh*.

2.1.3.3 Produk Jasa

Produk jasa adalah salah satu produk yang terus dikembangkan dalam perbankan. Produk jasa merupakan produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang akan diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Diantaranya adalah *letter of credit* (L/C) impor syariah, bank garansi syariah, transfer dan inkaso, gadai syariah (*rahn*), *syariah charge card* dan pembiayaan multijasa.

2.2 Corporate Governance di Bank Syariah

Corporate Governance adalah suatu sistem yang dianut oleh perusahaan untuk mengimplementasikan suatu sistem pengelolaan yang baik dalam perusahaan. Terdapat banyak definisi yang muncul mengenai CG dari berbagai ahli, namun pada dasarnya makna dari *Corporate Governance* dari berbagai definisi tersebut ialah sama, yakni secara singkat CG atau tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk membuat kinerja dan operasional perusahaan menjadi lebih terarah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam CG.

Tata kelola perusahaan yang baik sangatlah diperlukan bagi industri perbankan untuk mencapai perbankan yang sehat khususnya pada industri perbankan syariah. Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa CG wajib diterapkan dalam seluruh kegiatan usaha perbankan syariah. Kewajiban ini ditentukan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mencakup prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shidiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi/keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *hasan* (profesional), dan *wasathan* (kewajaran) dalam menjalakan kegiatan usahanya.

Pada industri perbankan syariah terdapat suatu badan yang mengawasi pelaksanaan kegiatan dan tata kelola perusahaan yang ada

dalam perbankan syariah yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS diangkat dan diberhentikan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini diatur dalam pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.1 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Corporate Governance (CG) memiliki arti penting bagi perusahaan diantaranya adalah memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan itu sendiri. CG juga mendorong pengelolaan suatu perusahaan untuk lebih profesional, transparan dan efisien. Selain itu, CG juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik. CG juga dapat meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan serta meningkatkan pelayanan pada para pemangku kepentingan. Dengan adanya suatu sistem CG dalam perusahaan dapat berdampak pada mudah diperolehnya dana pembiayaan. Hal ini terjadi karena adanya faktor kepercayaan dari berbagai pihak. Dengan demikian CG juga dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham dari perusahaan tersebut.

2.2.2 Prinsip Corporate Governance

Terdapat lima prinsip dalam penerapan GCG yaitu, *Transparancy* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi) dan *Fairness* (kesetaraan). Yang dimaksud transparansi adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan secara terbuka, tepat waktu dan jelas. Akuntabilitas adalah prinsip yang mengatur peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Responsibilitas adalah perusahaan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, independensi adalah perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar pengelolaan dapat dilakukan dengan baik. Dan juga untuk menghindari campur tangan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan pada perusahaan. Yang terakhir adalah prinsip kesetaraan, artinya semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas mendapat perlakuan dan hak yang sama.

2.3 Mekanisme *Corporate Governance* di Bank Syariah

Corporate Governance merupakan suatu sistem tata kelola dalam perusahaan agar perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Tata kelo perusahaan yang baik memiliki mekanisme untuk mendukung jalannya *Corporate Governance*, yaitu mekanisme internal dan eksternal.

Mekanisme internal dalam CG tersebut di dalamnya terdapat struktur kepemilikan dan dewan dalam pengawasannya. Struktur kepemilikan adalah salah satu aspek yang terdapat di dalam sistem CG. Dimana struktur kepemilikan ini juga berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Selain itu yang membedakan mekanisme CG bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya mekanisme Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kinerja bank untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam Islam.

2.3.1 Kepemilikan Manajerial

Penelitian sebelumya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan bisa meningkatkan kualitas dari proses pelaporan keuangan, hal ini terjadi karena ketika pihak manajerial juga memiliki porsi kepemilikan, maka mereka juga akan bertindak sama seperti pemegang saham umumnya dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan mengungkapkan kondisi riil perusahaan (Agustia, 2013). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase dari jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari keseluruhan modal saham perusahaan yang beredar. Oleh karenanya, kepemilikan manajerial dapat memperburuk masalah keagenan. Direktur yang memiliki proporsi kepemilikan saham yang tinggi membuat perusahaan menjadi lebih rentan terhadap kolusi antara direktur dan manajemen perusahaan (Konijn,

Kraussl, dan Lucas 2011). Akan tetapi Piesse, Strange, dan Toonsi (2012) berargumentasi bahwa tingginya kepemilikan saham yang dimiliki oleh direktur dapat memotivasi dewan direktur untuk meningkatkan kinerja perusahaan. *Managerial signalling theory* mengatakan bahwa direktur memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada pemegang saham *outsiders* (Bebchuk dan Weisbach, 2010).

2.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah bagian dari saham perusahaaan yang dimiliki oleh investor institusi, seperti perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun, dan perusahaan lainnya yang terkait dengan kategori tersebut. Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik.

2.3.3 Pengawas Dewan Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, ataupun hubungan keluarga lainnya dengan para anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak secara independen. Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.

2.3.4 Pengawas Dewan Pengawas Syariah

Penerapan *Corporate Governance* merupakan suatu hal yang sangat penting pada bank syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, perbedaan tersebut terletak pada penerapan *shariah compliance*. Penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Salah satu tugas dari Dewan Pengawas Syariah yakni melakukan pengawasan internal bank agar operasional bank syariah yang berasangkutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Beberapa negara menyebut DPS sebagai *Shari'a Supersory Board* (SSB), atau *Shari'a Committee*, atau *Shari'a Council*.

2.4 Kinerja Bank Syariah

Dalam peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pada Bab 3 Pasal 6 menyatakan bahwa perbankan wajib melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank*

Rating). Penilaian yang dilakukan mencakup beberapa faktor yaitu profil risiko (*risk profile*), *corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*).

Penilaian faktor profil risiko adalah penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan kualitas penerapan manajemen risiko dalam perusahaan perbankan. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian pada aspek manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG. Penilian rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank. Serta penilaian permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

2.4.1 Risk Profile

Risk Profile (profile risiko) sebagaimana yang dimaksud merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan. Risiko tersebut meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan rasio keuangan berupa risiko pembiayaan.

2.4.1.1 Risiko pembiayaan yang dimaksud adalah kondisi dimana debitur atau penerbit dari instrument keuangan secara individu, perusahaan, ataupun negara memiliki kemungkinan tidak membayar pokok utang atau arus kas lain yang memiliki

keterkaitan dengan investasi sebagaimana dengan peraturan yang telah tertera dalam akad pembiayaan. Sehingga apabila pembayaran tidak dilakukan atau tertunda maka akan menimbulkan masalah bagi arus kas serta berpengaruh terhadap likuiditas bank sehingga menjadi penyebab utama kegagalan di industri perbankan.

Dalam perbankan syariah, bank tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan terhadap bunga tertangguh atau menjatuhkan denda terkecuali disebabkan oleh adanya penundaan yang dilakukan secara sengaja. Karena apabila terjadi penundaan maka akan berperngaruh terhadap produktifitas bank dan penghasilan tidak akan didapat oleh deposan-nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut maka industri bank syariah menggunakan jaminan dan akad yang telah dilaksanakan sebelum adanya transaksi perjanjian penjualan.

Penelitian ini akan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai alat uji risiko pembiayaan. NPF menilai bagaimana kondisi aset di dalam bank dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan yang dilihat dari penilaian kualitas aset bank. Sehingga NPF bisa menjadi indikasi permasalahan yang terdapat didalam bank karena NPF dikenal sebagai suatu jenis pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh terhadap modal milik suatu bank.

Perhitungan *Non Performing Financing* dapat ukur dari pembiayaan bermasalah yang ada kemudian dibagi dengan total pembiayaan dan dikali dengan seratus persen.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, bahwa risiko pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 5%. Berikut adalah peringkat penilaian NPF berdasar ketentuan surat edaran Bank Indonesia:

Tabel 2. 1 Peringkat Non Performing Financing

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	< 2%
2	Baik	2% ≤ NPF<5%
3	Cukup Baik	5% ≤ NPF< 8%
4	Kurang Baik	8 ≤ NPF< 12%
5	Tidak Baik	NPF ≥ 12%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

2.4.2 *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aspek penilaian terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen bank yang menganut pada prinsip-prinsip GCG yang ada pada saat ini. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG perbankan dan informasi lain yang terkait dengan GCG. *Good Corporate Governance*

adalah sebagai *supervise* atau alat untuk memonitor kinerja dalam manajemen untuk menjamin akuntanbilitas manajemen bank terhadap *stakeholder* dengan memperhatikan kerangka peraturan yang ada sebagai peningkatan pada kinerja keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah meliputi prinsip transparasi (*transparency*), akuntanbilitas (*accountanbility*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Berikut merupakan peringkat GCG berdasarkan ketentuan Lampiran III.3 SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yaitu:

Tabel 2. 2 Peringkat Good Corporate Governance

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	NK < 1,5
2	Baik	1,5 < NK < 2,5
3	Cukup Baik	2,5 < NK < 3,5
4	Kurang Baik	3,5 < NK < 4,5
5	Tidak Baik	4,5 < NK < 5

Sumber: Surat Edaran OJK

2.4.3 Rentabilitas/Profitabilitas (*earnings*) adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi dalam usaha dan profitabilitas yang telah diraih oleh perbankan. Dalam rentabilitas (*earnings*) penetapan peringkat faktor dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas (*earnings*) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator tersebut serta mempertimbangkan

permasalahan lain yang berpengaruh terhadap rentabilitas bank. Sehingga *earnings* dipakai untuk mengetahui ukuran dana yang telah didapat dan digunakan untuk investasi pada suatu tempat yang produktif.

Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan harta yang produktif, namun tetap pada kaidah utama didirikannya bank yaitu untuk mendapatkan bunga atau deviden. Alat ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap *earning* adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas dalam perbankan. Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 bahwa *Return on asset* (ROA) merupakan perbandingan dari laba sesudah pajak dengan rata-rata total aset. Apabila *Return on asset* (ROA) yang dihasilkan oleh bank semakin besar maka keuntungan yang didapatkan bank juga akan semakin besar sehingga bila dilihat dari pengguna aset juga semakin baik. Berikut merupakan peringkat ROA berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (No.13/24/DPNP/2011) yaitu:

Tabel 2. 3 Peringkat Return On Assets

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	ROA > 1,5%
2	Baik	1,25% < ROA≤1,5%
3	Cukup Baik	0,5% < ROA≤1,25%
4	Kurang Baik	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Baik	ROA ≤ 0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

2.4.4 *Capital* merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan modal dan pengelolaan modal yang ada dalam bank. Penetapan peringkat penilaian terhadap faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator yang ada serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Tujuannya adalah untuk mengetahui modal yang digunakan suatu perusahaan apakah mampu mencukupi setiap aktivitas yang ada dalam perusahaan secara efisien atau juga untuk mengetahui ada tidaknya kerugian yang bisa dielakkan.

2.5 *Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja merupakan suatu gambaran dari pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan untuk mewujudkan tujuan mereka. Dimana salah satu tujuan penting didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui *Corporate Governance* (CG) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam perusahaan. Dalam konteks perbankan, khususnya bank syariah wajib menerapkan suatu tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip-prinsip yang ada dalam praktek CG.

Penerapan CG pada perusahaan perbankan dapat dikatakan unik karena bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan maupun perusahaan non keuangan. Menurut *Indonesia*

Corporate Governance Banking Watch keunikan perbankan dapat dilihat dari neraca yaitu asset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi kewajiban adalah tabungan dan deposit yang memiliki sifat jangka pendek. Sehingga apabila pengelolaan dilakukan dengan tidak berhati-hati maka tidak sesuai dengan aktiva dan pasiva.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan dimana dapat mengurangi tindakan tidak rasional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut teori Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan orang dalam dapat menyebabkan konvergensi kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Sehingga semakin banyak proporsi kepemilikan manajerial diharapakan dapat meningkatkan kinerja dan nilai dari perusahaan.

Dengan adanya kepemilikan manajerial akan meningkatkan motivasi dan kinerja dari para karyawan (Tertius dan Christiawan 2014). Kinerja tersebut termasuk dalam kaitannya dengan bagaimana *stakeholder* menangani permasalahan dalam risiko yang ada di bank. Risiko yang dimaksud diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kepemilikan

saham terutama manajerial akan mengurangi *agency cost* dan mengurangi risiko kredit. Dalam penelitian ini risiko yang akan diukur adalah risiko pembiayaan. Dengan demikian penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah.

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia

Sebagai pemilik saham, institusi dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. Institusi merupakan investor yang dianggap lebih ahli dalam memproses informasi jika dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, adanya kepemilikan institusional akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengelola manajemen dan tidak akan memainkan angka-angka dalam laporan keuangan. Ardianingsih dan Ardiyani (2010) yang menemukan bahwa adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dari pihak institusi dan akan mempengaruhi kinerja dari manajerial perusahaan untuk lebih produktif dan optimal. Melalui mekanisme kepemilikan institusional akan meningkatkan efektivitas kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan termasuk ketika ada permasalahan terhadap risiko yang ada di bank syariah. Dalam penelitian ini jenis risiko yang akan diukur

adalah risiko pembiayaan. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah.

2.6.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia

Dewan komisaris independen adalah dewan yang keanggotaannya tidak berasal dari dewan direksi ataupun pemegang saham. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen memiliki fungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris (Tertius dan Christiawan, 2015). Dewan komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proporsi dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pada pengambilan kebijakan dalam perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka akan semakin baik pula fungsi pengawasan yang ada di dalam perusahaan. Pengawasan tersebut termasuk dalam kaitannya terhadap sikap *stakeholder* dalam menangani risiko yang ada di bank. Dalam penelitian ini risiko yang dimaksud adalah risiko pembiayaan. Oleh karena itu, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pelaksanaan *Corporate Governance* dalam perusahaan. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah.

2.6.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (*Fiqh al-Muamalat*). Namun, DPS bisa juga anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan islam dan fiqh muamalat. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mengulas dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip dalam syariat islam. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah.

2.6.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia

Struktur kepemilikan dimana salah satunya adalah kepemilikan manajerial merupakan mekanisme *corporate governance* yang dapat

mengatasi masalah keagenan yang ada di dalam suatu perusahaan atau perbankan. Kepemilikan manajerial adalah jenis kepemilikan yang saham-sahamnya dimiliki oleh para direksi dan direktur. Dengan demikian para manajer akan lebih berhati-hati dalam mengelola manajemen agar tidak merugikan perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan manajer, maka akan semakin besar pula usaha para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan (*alignment of interest*) hal ini dikarenakan manajer memiliki bagian atas laba yang diperoleh oleh perusahaan (Tertius dan Christiawan, 2015). Dalam penelitiannya, Khafid (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifian berpengaruh terhadap persistensi laba. Dengan demikian, kepentingan antara agen dan pemilik akan sejalan yaitu meningkatkan return perusahaan (ROA). Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5 : Kepemilikan Manajerial bepengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

2.6.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia

Kepemilikan institusional dapat di definisikan merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* pada perusahaan. Sebagai pemilik saham, institusi dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. Institusi merupakan investor yang dianggap lebih ahli dalam memproses informasi jika dibandingkan dengan investor

individual. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan dapat mengimbangi tingkat efisiensi usaha perbankan dan profitabilitas bank. Selain itu, besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusional akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dari pihak manajemen perusahaan yaitu dengan memberikan motivasi lebih kuat untuk meningkatkan aktivitas produktif perusahaan yang akan berdampak pada laba yang diperoleh dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Prahesti dan Abundanti (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *earnings* (ROA). Apabila pemegang saham pihak institusi seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan keuangan lainnya melakukan pengelolaan laba yang diperoleh pihak bank dengan baik, maka profitabilitas bank akan turut meningkat. Dengan demikian dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

2.6.7 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham,

dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen adalah struktur dewan yang memiliki fungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka akan semakin baik pula fungsi pengawasan yang ada di dalam perusahaan (Englantine, 2018). Dimana hal tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para *stakeholder* dalam meningkatkan aktivitas kinerja mereka sehingga dapat pula meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H7 : Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabiltas bank syariah.

2.6.8 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS dilarang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank demi kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai dengan ketetapan dalam RUPS. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Anggota DPS diangkat

melalui RUPS. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H8 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap risiko kredit bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh industri perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia sesuai dengan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia tahun 2018. Sampel dalam penelitian berjumlah 42. Dalam penelitian ini alpha (α) yang digunakan adalah sebesar 10%. Penelitian ini memakai metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank Syariah yang mempublikasi laporan keuangan tahunan periode 2008, 2011, 2014, 2017
2. Bank Syariah yang mempublikasikan laporan GCG tahunan periode 2008, 2011, 2014, 2017

3.2 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperlukan adalah data laporan keuangan dan laporan GCG perusahaan bank umum syariah yang dapat diperoleh dari situs web perusahaan dan data penelitian sebelumnya.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kinerja keuangan dalam penelitian ini akan diukur dari sisi risiko kredit (NPF) dan profitabilitas (ROA).

a. Risiko Kredit

Risiko kredit akan diukur dari NPF yang bertindak sebagai cerminan dari risiko pembiayaan, apabila NPF rendah maka semakin rendah pula risiko yang diterima oleh perbankan sehingga kemungkinan kebangkrutan bank juga akan semakin rendah.

$$\text{NPF} = \frac{pembiayaan\ bermasalah}{total\ pembiayaan} \text{ x } 100\%$$

b. Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas (e*arnings*) akan dihitung menggunakan ROA untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola asset untuk mencapai keuntungan. Jika ROA yang dihasilkan semakin besar maka laba yang dicapai oleh suatu bank juga semakin besar. Berikut merupakan rumus menghitung ROA berdasarakan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

$$\text{ROA} = \frac{laba\ bersih}{rata{-}rata\ total\ aset} \text{ x } 100\%$$

c. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \text{ x } 100\%$$

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \text{ x } 100\%$$

e. Dewan Komisaris Independen

Ukuran dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris eksternal}}{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan}} \text{ x } 100\%$$

f. Dewan Pengawas Syariah

Penilaian ukuran dewan pengawas syariah dapat diukur dengan:

Ukuran Dewan Pengawas Syariah = $\sum$ Dewan Pengawas Syariah

3.4 Alat Analisis

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk dapat mengetahui gambaran (deskriptif) mengenai suatu data atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif menjelaskan data dengan cara menunjukan hasil pengukuran mean, median, nilai minimal dan maksimal, serta standar deviasi semua data atau variabel tersebut.

3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang diukur dari sisi risiko kredit (NPF) dan profitabilitas (ROA). Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Model Regresi 1

$$\mathbf{NPF_{it} = \alpha + \beta 1\ KM_{it} + \beta 2\ \ KI_{it} + \beta 3\ UDKI_{it} + \beta 4\ UDPS_{it} + \varepsilon}$$

b. Model Regresi 2

$$\mathbf{ROA_{it} = \alpha + \beta 1\ KM_{it} + \beta 2\ \ KI_{it} + \beta 3\ UDKI_{it} + \beta 4\ UDPS_{it} + \varepsilon}$$

Dimana:

NPF_{it} = kemampuan mengelola pembiayaan bermasalah bank i tahun t

ROA_{it} = keuntungan kinerja bank syariah i tahun t

KM_{it} = kepemilikan manajerial bank syariah i tahun t

KI_{it} = kepemilikan institusional bank syariah i tahun t

$UDKI_{it}$ = ukuran dewan komisaris independen bank syariah i tahun t

$UDPS_{it}$ = ukuran dewan pengawas syariah bank syariah i tahun t

α = konstanta

$\beta 1 - \beta 3$ = koefisien regresi

ε = error

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam nalisis regresi diperlukan untuk menghindari permasalahan pada asumsi klasik agar tidak menimbulkan masalah dalam penggunaannya. Analisis regresi dikatakan valid jika memenuhi asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedatisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. Berikut ini adalah tiga asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini:

3.4.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi dapat dikatakan valid dan baik apabila tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas. Jenis analisis yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel bebas adalah melalui metode *Least Squares*.

3.4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi korelasi antara data atau antara data sebelum dengan data sesudahnya dalam data yang disusun berdasarkan urutan waktu (*time series*). Model regresi dapat dikatakan valid dan baik apabila tidak terjadi autokorelasi. Ada berbagai jenis analisis yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi, salah satunya melalui Uji Durbin Waston (DW-*Test*).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh praktik *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdaftar dalam Statistik Perbankan Syariah Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampelnya. Dimana pemilihan sampel tersebut didasarkan atas bebrapa kriteria tertentu yang dimiliki oleh sampel. Dari kriteria tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan perbankan syariah.

Dalam penelitian ini data perusahaan yang digunakan adalah berupa laporan tahunan dan laporan keuangan dari perusahaan. Data tersebut diperoleh dari situs web resmi perusahaan perbankan syariah masing-masing. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi (uji autokorelasi dan uji multikolinieritas) dan pengujian hipotesis (analisis regresi berganda) dengan menggunakan *software* SPSS.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui deskripsi dari suatu data dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris

independen, ukuran dewan pengawas syariah, *non performing financing* (NPF), dan *return on assets* (ROA).

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
NPF	42	,50	,00	,50	,0471	,08182	,007
ROA	42	,22	-,11	,11	,0129	,03210	,001
KM	42	,03	,00	,03	,0017	,00581	,000
KI	42	,45	,55	1,00	,9421	,11860	,014
UDKI	42	1,00	,00	1,00	,1069	,27484	,076
UDPS	42	2,00	2,00	4,00	2,3571	,53289	,284
Valid N (listwise)	42						

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS, 2018

Dalam penelitian ini variabel dependen Non Perfroming Financing (NPF) pada hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 0,50%. Kemudian untuk nilai rata-rata menunjukkan hasil sebesar 0,047% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,081%. Hal ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan pada perusahaan.

Pada variabel dependen *Return On Assets* (ROA) hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar -0,11% dan nilai maksimum sebesar 0,11%. Kemudian diketahui nilai rata-rata ROA adalah sebesar 0,0129% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,032%. Hal ini menunjukkan perbandingan antara laba bersih dan rata-rata total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Dilihat dari hasil yang didapatkan pada tabel 4.1 analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa variabel independen kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 0,03%. Kemudian diketahui bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0017% dengan nilai standar deviasi yang dimiliki oleh kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,0058%. Pada nilai standar deviasi, apabila nilai yang dimiliki kepemilikan manajerial semakin besar maka menunjukan bahwa kepemilikan tersebut semakin menyebar atau bervariasi. Apabila nilai standar deviasi yang diperoleh semakin kecil berarti kepemilikan tersebut semakin merata pada sampel perusahaan.

Hasil dari kepemilikan institusional menunjukan bahwa nilai minimum pada uji statistik deskriptif sebesar 0,55% dan nilai maksimum sebesar 100%. Kemudian diketahui bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,94%. Pada nilai standar deviasi diketahui hasilnya adalah sebesar 0,11%, dimana semakin besar nilai standar deviasi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional akan menunjukan bahwa kepemilikan tersebut semakin menyebar atau bervariasi. Jika standar deviasi yang diperoleh semakin kecil berarti kepemilikan tersebut semakin merata pada sampel perusahaan.

Hasil dari uji statistik deskriptif ukuran dewan komisaris independen menunjukan hasil 0% pada nilai minimum dan 100% pada nilai maksimum. Kemudian dari hasil uji tersebut dapat diketahui pula ukuran dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1069% dan nilai standar deviasi

sebesar 27,48%. Hal ini menunjukkan perbandingan antara jumlah anggota dewan komisaris eksternal dengan jumlah dewan komisaris perusahaan.

Pada variabel ukuran dewan pengawas syariah, hasil olah data menunjukkan ukuran dewan pengawas syariah berkisar antara 2.00 dan 4.00. Kemudian diketahui nilai rata-rata ukuran dewan pengawas syariah sebesar 2,35% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,53%. Hal ini menunjukkan total dari keseluruhan anggota dewan pengawas syariah.

4.2 Hasil Uji Hipotesis

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear sempurna antara beberapa variabel yang ada baik beberapa variabel atau keseluruhan variabel independen maupun variabel dependen yang ada pada model regresi berganda. Berikut merupakan hasil dari perhitungan uji multikolinearitas :

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,012	,152		-,079	,938		
	KM	-,927	2,336	-,066	-,397	,694	,975	1,026
	KI	,049	,124	,072	,397	,694	,827	1,209
	UDKI	-,008	,050	-,027	-,161	,873	,940	1,064
	UDPS	,006	,027	,042	,235	,815	,859	1,163
a. Dependent Variable: NPF								

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS, 2018

Pada tabel 4.2 hasil uji multikolinieritas dapat diketahui nilai Tolerance dan VIF pada tiap variabel. Nilai Tolerance dan VIF pada variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,975 dan 1,026, variabel kepemilikan institusional sebesar 0,827 dan 1,209, variabel ukuran dewan komisaris independen sebesar 0,940 dan 1,064 serta variabel ukuran dewan pengawas syariah sebesar 0,859 dan 1,163. Berdasarkan dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara masing-masing variabel bebas dengan variabel dependen Non Performing Financing (NPF) sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya karena nilai Tolerance < 1 serta nilai VIF < 10.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi diartikan sebagai korelasi yang terjadi antara komponen-komponen dari serangkaian observasi yang dilakukan baik dalam bentuk berderetan waktu (*time series* data) ataupun korelasi antara

tempat berdekatan (*cross section* data). Berikut adalah hasil dari perhitungan uji autokorelasi sehingga di dapatkan hasil berupa nilai statistik Durbin Watson:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,088[a]	,008	-,099	,08579	2,157
a. Predictors: (Constant), UDPS, UDKI, KM, KI					
b. Dependent Variable: NPF					

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS, 2018

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,157. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan hasil nilai dari tabel signifikansi Durbin-Watson dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 42 (n = 42) dan jumlah variabel independen yang dipakai adalah 4 (k = 4). Maka diperoleh hasil pada tabel dU adalah 1,7202 dan dL sebesar 1,3064. Nilai DW pada hasil uji autokorelasi pada penelitian ini adalah sebesar 2,157, nilai tersebut lebih besar dari nilai dU dan kurang dari nilai (4-dU) = 2,190. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.2.2 Hasil Uji Pengaruh

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap variabel dependen *Non Performing Financing* dan

Return On Assets. Uji analisis linear berganda dilakukan dengan software SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Analisis Linier Berganda dengan variabel dependen NPF

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,012	,152		-,079	,938
	KM	-,927	2,336	-,066	-,397	,694
	KI	,049	,124	,072	,397	,694
	UDKI	-,008	,050	-,027	-,161	,873
	UDPS	,006	,027	,042	,235	,815
a. Dependent Variable: NPF						

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS, 2018

Dari hasil pengolahan data diatas menunjukkan nilai persamaan yang didapatkan sebagai berikut :

NPF = -0,012 - 0,927 KM + 0,049 KI – 0,008 UDKI + 0,006 UDPS + ε

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa hasil konstanta adalah sebesar -0,012 memperlihatkan bahwa besarnya nilai variabel independen Kepemilikan Manajerial (KM,) Kepemilikan Institusional (KI), Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) jika tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0 maka nilai *non performing financing* yang terjadi adalah -0,012.

Kemudian untuk variabel kepemilikan manajerial (KM) merupakan variabel yang memiliki pengaruh koefisien regresi negatif sebesar -0,927 pada

Non Performing Financing. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila kepemilikan manajerial (KM) meningkat sebesar satu skor maka *Non Performing Financing* (NPF) akan menurun sebesar 0,927 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel yang mempengaruhi *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi positif sebesar 0,049. Hasil tersebut menunjukan bahwa apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar satu skor maka *Non Performing Financing* akan meningkat sebesar 0,0049 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Pada hasil uji variabel ukuran dewan komisaris independen (UDKI) menunjukkan pengaruh koefisien regresi negatif sebesar -0.008 pada *Non Performing Financing.* Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran dewan komisaris independen meningkat sebesar satu skor maka *Non Performing Financing* akan menurun sebesar 0,008 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS) merupakan variabel yang mempengaruhi *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi positif yakni sebesar 0,006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran dewan pengawas syariah meningkat sebesar satu skor maka *Non Performing Financing* akan meningkat sebesar 0,006 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Analisis Linier Berganda dengan variabel dependen ROA

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,088	,056		1,576	,124
	KM	-,730	1,033	-,113	-,707	,484
	KI	-,048	,045	-,182	-1,052	,300
	UDKI	-,010	,018	-,088	-,541	,592
	UDPS	-,012	,010	-,208	-1,212	,233
a. Dependent Variable: ROA						

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS, 2018

Dari hasil pengolahan data diatas menunjukkan nilai persamaan yang didapatkan sebagai berikut :

ROA = 0,088 - 0,730 KM - 0,04 KI – 0,010 UDKI - 0,012 UDPS + ε

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa hasil konstanta adalah sebesar 0,088 memperlihatkan bahwa besarnya nilai variabel independen Kepemilikan Manajerial (KM,) Kepemilikan Institusional (KI), Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) jika tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0 maka nilai *Return On Assets* yang terjadi adalah 0,088.

Kemudian untuk variabel kepemilikan manajerial (KM) merupakan variabel yang memiliki pengaruh koefisien regresi negatif sebesar -0,730 pada *Return On Assets.* Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila kepemilikan manajerial (KM) meningkat sebesar satu skor maka *Return On Assets* (ROA)

akan menurun sebesar 0,730 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,048. Hasil tersebut menunjukan bahwa apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar satu skor maka *Return On Assets* (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0,0048 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Pada hasil uji variabel ukuran dewan komisaris independen (UDKI) menunjukkan pengaruh koefisien regresi negatif sebesar -0.010 pada *Return On Assets* (ROA). Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran dewan komisaris independen menurun sebesar satu skor maka *Return On Assets* (ROA) akan menurun sebesar 0,010 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS) merupakan variabel yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) dengan koefisien regresi negatif yakni sebesar -0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran dewan pengawas syariah meningkat sebesar satu skor maka *Return On Assets* (ROA) akan menurun sebesar 0,012 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan manajerial lebih besar dari nilai signifikasni yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,694, artinya bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga hipotesis pertama yang disebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap risiko kredit tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena tingkat kepemilikan manajerial pada bank syariah sangat rendah yang menyebabkan pihak manajemen belum dapat secara maksimal mengelola perusahaan dan tidak memiliki peran yang cukup besar dala pengambilan keputusan sehingga tidak berpengaruh terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) yang mengungkapkan bahwa, kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifian positif berpengaruh terhadap persistensi laba. Namun hasil penelitian ini juga didukung oleh Agustia (2013) yang menemukan bahwa tingkat kepemilikan manajerial memang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

4.3.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,694, artinya bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga hipotesis kedua yang berbunyi bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap risiko kredit tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ardianingsih dan Ardiyani (2010) yang menemukan bahwa adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dari pihak institusi dan akan mempengaruhi kinerja dari manajerial perusahaan untuk lebih produktif dan optimal. Disisi lain hasil dari penelitian ini didukung oleh Agustia (2013) dimana dalam penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa tingkat kepemilikan institusional tidak memiliki perngaruh terhadap manajemen laba.

4.3.3 Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan komisaris independen lebih besar dari nilai signifikasni yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,873, artinya bahwa variabel ukuran dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing*

(NPF). Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap risiko kredit ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Eliyanora dan Veronica (2014) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bank. Hal ini disebabkan karena penempatan atau penambahan anggota komisaris independen hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja ukuran dewan komisaris independen tidak meningkat.

4.3.4 Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan pengawas syariah lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,815, artinya bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karena itu hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap risiko kredit tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustina (2018) yang meunjukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *earning management.* Hal ini terjadi karena Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk biasanya hanya berdasarkan popularitas dan tokoh masyarakat untuk menaikkan citra dari bank syariah itu sendiri (Rahmat, 2017).

4.3.5 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan manajerial lebih besar dari nilai signifikasni yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,484, artinya bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap profitabiltas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Sehingga hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap profitabiltas ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Guna dan Herawaty (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemungkinan hal ini terjadi karena proporsi kepemilikan manajerial pada bank syariah sangatlah rendah sehingga pihak manajerial tidak memiliki wewenang dan pengaruh berarti dalam kebijakan perusahaan. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan Khafid (2012) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifian berpengaruh terhadap persistensi laba.

4.3.6 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dari hasil pengamatan pada hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,300, artinya bahwa

variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap profitabiltas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Maka hipotesis keenam yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Khafid (2012) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifian terhadap persistensi laba. Selain itu Sriwedari (2012) dalam penelitannya juga mengungkapkan bawa mekanisme *Good Corporate Governance* dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasilnya menunjukkan pengaruh yang lemah.

4.3.7 Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dari hasil pengamatan pada hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan komisaris independen lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,592, artinya bahwa variabel ukuran dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap profitabiltas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Sehingga hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tertius dan Christiawan (2015) yang berdasarkan hasil penelitian mereka ditemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemungkinan hal ini terjadi karena

penempatan atau penambahan anggota komisaris independen hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja ukuran dewan komisaris independen tidak meningkat (Eliyanora dan Veronica, 2014)

4.3.8 Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dari hasil pengamatan pada hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan pengawas syariah lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,233, artinya bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap profitabiltas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Dengan begitu hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap profitabilitas ditolak. Hal ini terjadi kemungkinan karena Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk biasanya hanya berdasarkan popularitas dan tokoh masyarakat untuk menaikkan citra dari bank syariah itu sendiri (Rahmat, 2017). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Agustina (2018) yang menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *earning management.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia yang menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran dewan pengawas syariah serta *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel dependen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Sehingga hipotesis pertama yang berbunyi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap risiko kredit tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan proporsi kepemilikan pihak manajerial pada bank syariah sangatlah rendah dikarenakan mayoritas perbankan syariah di Indonesia merupakan anak cabang dari perbankan konvensional sehingga mayoritas saham dimiliki oleh pihak Institusional.
2. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Maka dari itu hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap risiko kredit ditolak. Hal ini dapat terjadi karena jika proporsi kepemilikan institusional rendah, maka akan rendah pula kesempatan bagi pemegang

saham untuk dapat melakukan monitoring pada perusahaan sehingga tidak berpengaruh pada tingkat risiko kredit (NPF).

3. Ukuran Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap risiko kredit tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena penempatan atau penambahan anggota komisaris independen dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja ukuran dewan komisaris independen tidak meningkat.
4. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap risiko kredit tidak terbukti. Hal ini terjadi karena Dewan Pengawas Syariah biasanya ditunjuk hanya berdasarkan popularitas tokoh dalam masyarakat untuk menaikkan citra dari bank syariah itu sendiri. Sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank tidak terlalu berpengaruh.
5. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Sehingga hipotesis kelima yang berbunyi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dapat terjadi karena proporsi kepemilikan manajerial dalam perbankan syariah sangatlah

rendah. Hal ini diakibatkan karena mayoritas perbankan syariah di Indonesia adalah anak cabang dari perbankan konvensional sehingga mayoritas saham dimiliki oleh pihak institusi.

6. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Maka dari itu hipotesis keenam yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas ditolak. Hal ini terjadi karena apabila proporsi kepemilikan pihak institusional rendah, maka akan rendah pula kesempatan bagi pemegang saham untuk dapat melakukan monitoring pada perusahaan sehingga tidak berpengaruh pada tingkat profitabilitas (ROA).
7. Ukuran Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Sehingga hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena komisaris independen ditempatkan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal undang-undang yang berlaku, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja ukuran dewan komisaris independen tidak meningkat.
8. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Maka hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap profitabilitas tidak terbukti. Hal ini terjadi karena Dewan Pengawas Syariah ditunjuk bukan berdasarkan kemampuan

mereka pada bidang terkait. Biasanya mereka ditunjuk hanya berdasarkan popularitas tokoh dalam masyarakat untuk menaikkan citra dari bank syariah itu sendiri. Sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank tidak terlalu berpengaruh.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya variabel yang diteliti ditambah. Penelitian ini hanya menggunakan enam variabel, dengan demikian memiliki berbagai keterbatasan sehingga berpengaruh terhadap hasil analisis.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penambahan sampel penelitian pada sektor lain. Mungkin bisa melakukan perbandingan penelitian dengan objek perbankan syariah di lain negara sehingga akan menambah wawasan bagi khalayak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, Dian, 2013, Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 1, Hal 27-42.

Agustina, Ahadiah, 2018, *Pengaruh Komite Audit dan Pengawas Syariah terhadap Earning Management Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2012-2015*, Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Annisa, R. Dewintha Nur dan Ratna Wardhani, 2013, Analisis Pengaruh Struktur Good Corporate Governance dan Kinerja terhadap Risiko Kredit Perbankan, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Bebchuk, L. dan Weisbach, M, 2010, The State of Corporate Governance Research, *The Review of Financial Studies*, 23 (3): 939-961.

Effendi, Muh. Arief, 2009, *The Power of Good Corporate Governance*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

El-Chaarani, H, 2014, The Impact of Corporate Governance on the Performance of Lebanese Banks. *The International Journal of Business and Finance Research, 8*(5), 22-34.

Eliyanora dan Veronica Sylvia, 2014, Pengaruh Ukuran Dewan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap NPL, *Jurnal Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah*, Vol 7 No 1.

Guna, Welvin I dan Arleen Herawaty, 2010, Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, Hal 53-68.

Ingrid Prima Fitria Englantine, 2018, Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode RGEC pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016, Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Khafid, Muhammad, 2012, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Struktur Kepemilikan terhadap Persistensi Laba, *Jurnal Dinamka Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, Hal 138-148.

Konijn, S. Kraussl, R. dan Lucas, A, 2011, Blockholder Dispersion and Firm Value, *Journal of Corporate Finance*, 17 (5): 1330-1339.

Mauliyana, Vivi dan Nengah Sudjana, 2016, Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Pendekatan Risk Profil, Earnings dan Capital terhadap Bank Milik Pemerintah dan Bank Milik Swasta Nasional Devisa, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 36 No. 1 pp. 38 – 47.

Nurdin, Ridwan, 2014, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia,* Pena, Banda Aceh.

Pertiwi, Tri Kartika dan Ferry Madi Ika Pratama, 2012, Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 14, No. 2, Hal. 118-127.

Piesse, J., Strange, R., dan Toonsi, F, 2012, Is there a Distinctive MENA Model of Corporate Governance, *Journal of Management & Governance*, 16 (4): 645-681.

Prahesti, Devi Shinta dan Nyoman Abundanti, 2015, *Pengaruh Risiko Kredit, Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali.

Rahmat, Biki Zulkifri, 2017, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmahnugraha, *Amwaluna*, Vol. 1 No. 2.

Setyarini, Yulia dan Melvie Paramitha, 2011, Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility, *Jurnal Kewirausahaan,* Vol. 5, No. 2

Siahaan, Fadjar OP, 2013, Peran Praktek GCG Memediasi Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 11 No. 2 pp 207-214.

Tertius, Melia Agustina dan Yulius Jogi Christiawan, 2015, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan, *Business Accounting Review,* Vol. 3, No. 1, Hal 223-232.

Utama, Cynthia Afriani, Sidharta Utama dan Fitriany Amarullah 2017, Corporate governance and ownership structure: Indonesia evidence, *Emerald Insight*, Vol. 7, No. 2, pp 165-191.

Wahyono, R. Erdianto Setyo, 2012, Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 12.

Wahyudin, Agus dan Badingatus Solikhah, 2017, Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance, *Emerald Insight*, Vol. 17, No.2, pp 250-265.

Wati, Like Monisa, 2012, Pengaruh Praktek Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Manajemen,* Vol. 01, No. 01.

LAMPIRAN

1. Daftar Sampel Perusahaan

Tahun	Bank Syariah	NPF	ROA	KM	KI	UDKI	UDPS
2017	PT. Bank Aceh Syariah	0,01	0,03	0,00	1,00	0,67	2
2017	PT. Bank Muamalat Indonesia	0,04	0,00	0,00	0,68	0,40	3
2017	PT. Bank Victoria Syariah	0,05	0,00	0,00	1,00	0,67	2
2017	PT. Bank BRISyariah	0,05	0,01	0,00	1,00	0,75	2
2017	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,22	-0,06	0,00	0,99	0,50	3
2017	PT. Bank BNI Syariah	0,03	0,01	0,00	1,00	0,75	2
2017	PT. Bank Syariah Mandiri	0,05	0,01	0,00	1,00	0,75	3
2017	PT. Bank Mega Syariah	0,03	0,02	0,00	1,00	0,67	2
2017	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0,13	-0,11	0,00	0,83	0,50	2
2017	PT. Bank Syariah Bukopin	0,08	0,00	0,01	0,99	0,50	2
2017	PT. BCA Syariah	0,00	0,01	0,00	1,00	0,67	2
2017	PT. Maybank Syariah Indonesia	0,00	0,06	0,00	0,99	0,67	2
2017	PT. BTPN Syariah	0,02	0,11	0,00	0,70	0,50	2
2014	PT. Bank Aceh Syariah	0,00	0,03	0,00	1,00	0,67	2
2014	PT. Bank Muamalat Indonesia	0,07	0,00	0,00	0,65	0,50	3
2014	PT. Bank Victoria Syariah	0,07	-0,02	0,00	1,00	1,00	2
2014	PT. Bank BRISyariah	0,05	0,00	0,00	1,00	0,80	2
2014	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,06	0,01	0,00	0,98	0,50	3
2014	PT. Bank BNI Syariah	0,02	0,01	0,00	1,00	0,67	2
2014	PT. Bank Syariah Mandiri	0,07	0,00	0,00	1,00	0,60	3
2014	PT. Bank Mega Syariah	0,04	0,00	0,00	1,00	1,00	3
2014	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0,01	0,02	0,00	0,76	0,67	2
2014	PT. Bank Syariah Bukopin	0,04	0,00	0,01	0,98	0,67	2
2014	PT. BCA Syariah	0,00	0,01	0,00	1,00	0,67	2
2014	PT. Maybank Syariah Indonesia	0,05	0,04	0,00	0,99	0,50	2
2014	PT. BTPN Syariah	0,01	0,04	0,00	0,70	0,67	2
2011	PT. Bank Aceh Syariah	0,50	0,03	0,00	1,00	0,67	2
2011	PT. Bank Muamalat Indonesia	0,00	0,02	0,00	0,86	0,50	3
2011	PT. Bank Victoria Syariah	0,02	0,07	0,00	1,00	0,67	2
2011	PT. Bank BRISyariah	0,03	0,00	0,00	1,00	0,75	2
2011	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,01	0,01	0,00	1,00	0,50	3
2011	PT. Bank BNI Syariah	0,04	0,01	0,00	1,00	0,67	2
2011	PT. Bank Syariah Mandiri	0,02	0,02	0,00	1,00	0,60	2
2011	PT. Bank Mega Syariah	0,03	0,02	0,00	1,00	0,33	3

2011	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0,01	0,02	0,00	1,00	0,67	2
2011	PT. Bank Syariah Bukopin	0,02	0,01	0,02	0,97	0,67	2
2011	PT. BCA Syariah	0,00	0,01	0,00	1,00	0,67	2
2011	PT. Maybank Syariah Indonesia	0,00	0,04	0,00	0,99	0,33	2
2008	PT. Bank Muamalat Indonesia	0,04	0,03	0,00	0,55	0,00	4
2008	PT. Bank Syariah Mandiri	0,02	0,02	0,00	1,00	0,50	3
2008	PT. Bank Mega Syariah	0,02	0,01	0,00	1,00	0,00	3
2008	PT. Bank Syariah Bukopin	0,02	-0,01	0,03	0,96	0,67	3